**UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Christoffel Aguesto Sirait

NPP. 32.0064

Asdaf Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0064@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Nurhadi, S.Sos, M.A.P

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The empowerment efforts for micro-enterprises in Labuhanbatu Regency still face several challenges, particularly regarding the low capacity of capital, skills, and market access for micro-entrepreneurs. Despite various policies implemented by the Cooperatives, Small, and Medium Enterprises (SMEs) Office, the gap between micro-enterprises and small and medium enterprises (SMEs) remains evident. This gap affects the sustainability and development of micro-enterprises in the region, posing a significant challenge for the local government in improving the economic welfare of the community.* **Purpose:** *This study aims to examine the micro-enterprise empowerment efforts carried out by the Cooperatives and SMEs Office of Labuhanbatu Regency and identify the supporting and inhibiting factors in the empowerment process.* **Method:** *This study uses a qualitative-descriptive approach with data collection methods through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants involved in this study are the Head of the Office, the Head of the Micro-Enterprise Empowerment Division, the Secretary of the Office, and micro-entrepreneurs in Labuhanbatu Regency. Data analysis is conducted using Amartya Sen's capability theory, focusing on four dimensions of empowerment: access to basic resources, skills development, economic freedom through market access, and social-political participation.* **Result:** *The results show that the empowerment efforts carried out by the Cooperatives and SMEs Office have involved various programs, such as providing production equipment, skills training, digital marketing assistance, and the implementation of the "Business Meeting" program to expand market networks. However, the main challenges faced include budget limitations, low utilization of technology, and limited knowledge and skills of micro-entrepreneurs. Supporting factors for empowerment include the availability of equipment assistance programs, community involvement, and increased market access through exhibitions and bazaars. Meanwhile, inhibiting factors include limited capital, low technological capacity, and difficulties in accessing formal financing.* **Conclusion:** *The Cooperatives and SMEs Office of Labuhanbatu Regency has implemented several significant empowerment efforts; however, the success of these programs is still limited by budget constraints and gaps in skills and technology. Therefore, further efforts are needed to optimize existing resources, including enhancing collaboration between the local government, the*

private sector, and micro-enterprise communities to accelerate the development of micro-enterprises in Labuhanbatu Regency.

Keywords: *Empowerment, Micro Enterprise, MSMEs, Capability Theory, Labuhanbatu Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Upaya pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan rendahnya kapasitas modal, keterampilan, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), kesenjangan antara usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah (UKM) masih terlihat jelas. Kesenjangan ini mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha mikro di daerah tersebut, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Sekretaris Dinas, dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu. Analisis data dilakukan menggunakan teori kapabilitas Amartya Sen yang berfokus pada empat dimensi pemberdayaan: akses terhadap sumber daya dasar, peningkatan keterampilan, kebebasan ekonomi melalui akses pasar, dan partisipasi sosial-politik. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah melibatkan berbagai program, seperti pemberian peralatan produksi, pelatihan keterampilan, pendampingan digital marketing, dan pelaksanaan program “Temu Usaha” untuk memperluas jaringan pasar. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi adanya program bantuan peralatan, keterlibatan komunitas, dan peningkatan akses pasar melalui pameran dan bazaar. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan permodalan, rendahnya kapasitas teknologi, dan kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. **Kesimpulan:** Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan sejumlah upaya pemberdayaan yang cukup signifikan, keberhasilan program-program tersebut masih terbatas oleh faktor anggaran dan kesenjangan keterampilan serta teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas pelaku usaha mikro dalam rangka mempercepat pengembangan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu.

Kata Kunci: **Pemberdayaan, Usaha Mikro, UMKM, Teori Kapabilitas, Kabupaten Labuhanbatu**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan menjadikan sektor UMKM sebagai sektor yang tidak bisa diabaikan. UMKM di Indonesia mendominasi lebih dari 99% total unit usaha di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurut data dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN), pada tahun 2023, UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan total 66 juta unit usaha. Pertumbuhan ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian negara, meskipun banyak dari pelaku UMKM yang terkendala dalam pengembangan usaha mereka. Dalam perkembangan sektor UMKM, salah satu sub-sektor yang seringkali mengalami kendala dalam pengembangan adalah usaha mikro. Usaha mikro memiliki modal dan omzet yang terbatas, serta sering kali menghadapi tantangan dalam pengaksesannya terhadap sumber daya penting seperti modal, pasar, teknologi, serta keterampilan. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi langkah yang sangat penting untuk memperkuat sektor ini, agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil atau menengah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Adapun Pemberdayaan menurut (Friedman, 1992) pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kekuasaan mereka yang lemah atau tidak beruntung, menurut Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses memberikan masyarakat kebebasan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat membantu mereka menentukan masa depan mereka sendiri serta dapat berkontribusi pada upaya yang mempengaruhi kehidupan kelompok mereka (Ife, 1997)

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program telah memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap daerah, yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan program-program yang mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses integral yang berkaitan erat dengan penguatan kapasitas individu dan kelompok dalam suatu komunitas, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, Hendrawati Hamid dalam buku "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat" menekankan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara kolektif, melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural (Hendrawati Hamid, 2018). Program-program oleh dinas ini meliputi pelatihan keterampilan, pemberian modal, kemudahan dalam perizinan, serta perluasan akses pasar. Namun, meskipun telah ada berbagai upaya pemberdayaan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, terutama yang terkait dengan keterbatasan akses terhadap permodalan, kurangnya keterampilan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, terutama usaha mikro. Dengan jumlah pelaku usaha mikro yang mencapai 9.584 unit usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha mikro. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pemberdayaan usaha mikro adalah teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Menurut teori ini, pemberdayaan usaha mikro dapat diukur

melalui empat dimensi utama: (1) akses terhadap sumber daya dasar, (2) peningkatan keterampilan, (3) kebebasan ekonomi melalui akses pasar, dan (4) peningkatan partisipasi sosial dan politik. Dengan menggunakan teori kapabilitas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro.

Latar belakang masalah penelitian ini berfokus pada pentingnya pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan usaha mikro di daerah tersebut, serta mengkaji efektivitas program-program yang telah dijalankan. Dengan mengacu pada teori kapabilitas Amartya Sen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan usaha mikro. Penelitian ini akan membahas berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu, termasuk penyediaan akses permodalan, pelatihan keterampilan, perluasan pasar, serta kebijakan yang memfasilitasi partisipasi sosial dan politik pelaku usaha mikro. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung seperti adanya program bantuan modal, pelatihan, dan dukungan dari komunitas usaha mikro, serta faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya keterampilan pelaku usaha mikro.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro agar dapat bersaing dengan usaha kecil dan menengah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk pengoptimalan program-program pemberdayaan yang telah dilakukan, serta strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun pemberdayaan usaha mikro masih mengalami kendala yang signifikan. Adapun kesenjangan seperti dalam akses permodalan walaupun program pemberian bantuan peralatan dan modal usaha telah dilakukan, namun akses terhadap permodalan yang efektif masih rendah. Mayoritas pelaku usaha mikro masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang menghambat perkembangan usaha mereka. Kesenjangan dalam peningkatan keterampilan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui komunitas seperti “Rumah Kreatif” memang sudah berlangsung, namun implementasi pelatihan secara berkelanjutan masih kurang optimal. Dampaknya, keterampilan yang didapatkan oleh pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memperkenalkan digital marketing kepada para pelaku usaha mikro, pemanfaatan

teknologi informasi dalam praktiknya masih terbatas. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan platform digital secara efektif. Kesenjangan dalam kemudahan akses pasar dan perizinan program-program pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pasar seperti “Temu Usaha” dan sosialisasi perizinan usaha mikro masih bersifat terbatas. Para pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan menghadapi tantangan administratif dalam mengurus perizinan. Kesenjangan dalam partisipasi sosial dan politik Keterlibatan pelaku usaha mikro dalam pengambilan keputusan politik dan sosial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi lokal masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wadah representasi yang efektif bagi pelaku usaha mikro dalam forum pengambilan keputusan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pemberdayaan telah dilakukan, namun implementasi program di lapangan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan usaha mikro, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sektor usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fadilla & Hasan, 2023) dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Penunjang Sektor Pariwisata di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kapabilitas Amartya Sen untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Wajo. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pelatihan inovasi produk dan pengembangan kemampuan dapat meningkatkan daya tarik pariwisata lokal dan pendapatan daerah. Namun, implementasinya masih terbatas dan belum merata. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokusnya pada sektor pariwisata, sedangkan penelitian ini fokus pada pemberdayaan usaha mikro di sektor ekonomi lokal. Penelitian (Yunus et al., 2021) dengan judul Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendekatan Analisis SWOT Balanced Scorecard. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan ancaman yang dihadapi oleh UMKM di Jawa Tengah dengan menggunakan analisis SWOT dan Balanced Scorecard. Hasil penelitian merekomendasikan integrasi horizontal untuk mengurangi persaingan dan memperluas pasar. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan teknik analisis yang berbeda (SWOT dan Balanced Scorecard), sementara penelitian ini lebih fokus pada pemberdayaan usaha mikro dengan menggunakan teori kapabilitas Amartya Sen. Penelitian (Anggraeni et al., 2021) dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Penelitian ini meneliti kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan UMKM selama pandemi COVID-19, dengan penekanan pada pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan dukungan teknologi digital. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal penggunaan teori pemberdayaan, namun berbeda dalam fokusnya yang lebih kepada kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dalam konteks daerah spesifik. Penelitian (Syntia et al., 2018) dengan judul *The effect of environmental management based micro, small & medium enterprises (MSMEs) empowerment on the achievement of sustainable development*. Penelitian ini membahas pengaruh pemberdayaan UMKM berbasis manajemen lingkungan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik ramah lingkungan oleh UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan

memberikan manfaat sosial, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung penerapan manajemen lingkungan termasuk dukungan pemerintah, pelatihan, dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Kesimpulannya, pemberdayaan UMKM dengan fokus pada keberlanjutan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan perlu adanya insentif serta kebijakan yang mendukung dari pemerintah. Penelitian (Purnomo & Purwandari, 2025) dengan judul *A Comprehensive Micro, Small, and Medium Enterprise Empowerment Model for Developing Sustainable Tourism Villages in Rural Communities: A Perspective*. Penelitian ini membahas model pemberdayaan UMKM yang komprehensif untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan di komunitas pedesaan. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya peran UMKM dalam pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi lokal. Model pemberdayaan yang diusulkan mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas, dan akses ke sumber daya untuk memfasilitasi pengembangan UMKM di sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan daya tarik desa wisata, memperkuat ekonomi pedesaan, serta mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Jurnal ini merekomendasikan kebijakan yang mendukung integrasi UMKM dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah pedesaan. Penelitian oleh (Suwatno et al., 2016) dengan judul *Empowerment strategies in cooperative and micro, small, medium enterprises (MSME) to increase people's income*. penelitian ini membahas strategi pemberdayaan pada koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemberdayaan yang tepat, seperti pelatihan, pemberian akses ke pasar, dan peningkatan kapasitas manajerial, dapat meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pemberdayaan ini antara lain dukungan pemerintah, kemitraan dengan sektor swasta, dan akses terhadap sumber daya serta teknologi. Kesimpulannya, pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui strategi yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh (Anggraini et al., 2022) dengan judul pemberdayaan petani kelapa sawit di kecamatan kampung rakyat oleh dinas perkebunan dan peternakan kabupaten labuhanbatu selatan. Penelitian ini menganalisis pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit. Meskipun terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan baik, seperti perencanaan dan pendampingan intensif, program ini menghadapi kendala seperti rendahnya pengetahuan petani, keterbatasan sarana, dan ketidakstabilan harga sawit. Selain itu, rendahnya kepercayaan petani terhadap kelompok tani dan minimnya pengawasan lanjutan dari dinas terkait menghambat keberhasilan program. Hasilnya, meskipun ada progres dengan 963 ha lahan yang direplanting, pemberdayaan ini belum optimal dan masih memerlukan perhatian lebih untuk memperbaiki partisipasi dan pengawasan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penerapan teori kapabilitas Amartya Sen dalam menganalisis pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu, yang memberikan perspektif baru dalam memahami pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga kebebasan individu. Penelitian ini mengkaji pemberdayaan dalam empat dimensi yang lebih komprehensif (akses sumber daya dasar, peningkatan keterampilan, kebebasan

ekonomi, dan partisipasi sosial). Fokus pada pemberdayaan usaha mikro pasca-pandemi COVID-19 juga menjadi kebaruan, serta penekanan pada kolaborasi antara pemerintah dan komunitas "Rumah Kreatif" dalam meningkatkan daya saing UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di tingkat daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan usaha mikro yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian adalah suatu proses mencari suatu kebenaran yang menghasilkan dalil atau hukum. Dalam hal lain bahwa penelitian merupakan suatu proses untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan (Cendekia et al., 2019). Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif. yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, dalam hal ini mengenai upaya pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan kualitatif lebih berfokus pada deskripsi mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019). Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan secara rinci tentang upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu, dengan mengamati dan menjelaskan situasi yang ada, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi (Neuman, 2013). Penulis dalam melaksanakan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019) serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data oleh (Miles et al., 2013) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis upaya pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori dari Amartya Sen (Sen, 1999) yang mengembangkan konsep kapabilitas sebagai pendekatan pembangunan yang berfokus pada meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk memilih dan bertindak berdasarkan tujuan hidup mereka sendiri. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut ini.

3.1 Akses Sumber Daya dasar

Dimensi akses sumber daya dasar mengacu pada upaya untuk memperluas kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya dalam hal akses dasar.

Dimensi ini mencakup dua indikator yaitu kredit dan modal serta informasi pasar. Sumber daya dasar yang dimaksud mencakup permodalan, bahan baku, peralatan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Dalam konteks Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan dalam bentuk peralatan usaha seperti mesin penggoreng kering, alat pemanggang, dan mesin vakum untuk meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha mikro. Namun, meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan peralatan, banyak pelaku usaha mikro yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang lebih besar untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengandalkan pinjaman informal dengan bunga tinggi karena keterbatasan kemampuan untuk memberikan jaminan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan formal. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk kredit yang lebih terjangkau. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menunjukkan bahwa meskipun ada program pemberian modal dengan bunga 0% pasca-pandemi COVID-19, sebagian besar pelaku usaha tidak mengembalikan pinjaman tersebut, karena mereka menganggap bantuan tersebut berasal dari pemerintah. Sejak 2022, bantuan lebih difokuskan pada penyediaan peralatan produksi daripada dana langsung. Akses informasi pasar juga diberikan melalui program "Temu Usaha" yang mempertemukan pelaku usaha mikro dengan calon mitra usaha, memperluas jaringan mereka, dan membantu mereka menemukan pasar untuk produk mereka.

3.2 Peningkatan Keterampilan

Dimensi peningkatan keterampilan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha mikro. Peningkatan keterampilan ini menjadi bagian penting dari pemberdayaan, karena dapat membantu pelaku usaha mikro untuk lebih kompetitif dan mampu mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Dalam skripsi ini, peningkatan keterampilan dilakukan melalui beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas, di antaranya pelatihan pembuatan keripik, makanan ringan, pengemasan produk, kerajinan tangan, kewirausahaan, dan keterampilan lainnya yang relevan dengan sektor usaha mikro. Selain itu, program "Rumah Kreatif" yang dikelola oleh dinas menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro untuk saling bertukar pengetahuan dan keterampilan. Dalam Rumah Kreatif, pelaku usaha mikro yang sudah terampil juga turut berperan dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku usaha yang belum memiliki keterampilan atau pengalaman. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis terkait produk, tetapi juga membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha mereka. Pelatihan dan peningkatan keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro sesuai dengan teori kapabilitas Amartya Sen, yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengembangkan potensi diri. Dengan keterampilan yang lebih baik, pelaku usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka, memperluas jaringan pasar, dan memperbaiki kualitas produk yang mereka hasilkan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha mikro.

3.3 Akses Pasar

Dimensi akses pasar mengacu pada upaya untuk memperluas kemampuan pelaku usaha mikro dalam menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara lokal, regional, maupun digital. Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu aspek penting

dalam pemberdayaan usaha mikro adalah menciptakan kebebasan ekonomi bagi pelaku usaha melalui kemudahan untuk mengakses pasar, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu berperan penting dalam meningkatkan akses pasar bagi para pelaku usaha mikro dengan beberapa upaya konkret. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pameran dan bazaar rutin, yang diadakan untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat Labuhanbatu, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan visibilitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro. Selain itu, Dinas Koperasi juga mengadakan program “Temu Usaha”, yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha lainnya atau dengan pembeli potensial, sehingga menciptakan rantai pasok dan hubungan pasar yang saling menguntungkan. Selain pasar fisik, skripsi ini juga mencatat bahwa akses pasar digital mulai diberdayakan melalui pendampingan untuk menggunakan platform digital marketing dan e-commerce. Namun, meskipun ada upaya untuk memperkenalkan pemasaran digital, beberapa pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman tentang pemasaran online dan kurangnya akses ke teknologi yang dibutuhkan. Secara keseluruhan, dimensi akses pasar dalam penelitian ini mencakup berbagai inisiatif yang dilakukan untuk membantu pelaku usaha mikro mengakses pasar yang lebih luas, baik melalui peningkatan keterlibatan dalam pameran dan bazaar, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform digital.

3.4 Partisipasi Politik dan Sosial

Dimensi partisipasi politik dan sosial mengacu pada keterlibatan pelaku usaha mikro dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kebijakan yang terkait dengan usaha mikro. Berdasarkan teori kapabilitas Amartya Sen, partisipasi politik dan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan, di mana individu diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, baik di tingkat individu, komunitas, maupun kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Labuhanbatu, partisipasi sosial dan politik pelaku usaha mikro diwujudkan melalui keberadaan "Rumah Kreatif", yang menjadi wadah kolaborasi antara pelaku usaha mikro dan Dinas Koperasi dan UMKM. Komunitas ini berfungsi sebagai tempat bagi pelaku usaha mikro untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam kegiatan pemberdayaan. Selain itu, pelaku usaha mikro juga dilibatkan dalam forum-forum yang membahas kebijakan yang memengaruhi sektor UMKM di daerah tersebut. Dengan adanya keterlibatan aktif dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Sebagai contoh, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu secara aktif melibatkan pelaku usaha mikro dalam pameran dan bazar untuk memperkenalkan produk mereka, serta dalam program "Temu Usaha" yang mempertemukan pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha lain untuk membangun jaringan dan kolaborasi bisnis. Keterlibatan ini membantu mereka untuk memperluas akses pasar dan mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai peluang ekonomi dan kebijakan yang ada. Dengan demikian, partisipasi politik dan sosial di Kabupaten Labuhanbatu memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu berfokus pada empat dimensi utama: akses sumber daya dasar, peningkatan keterampilan, kebebasan ekonomi melalui akses pasar, dan partisipasi sosial dan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya dan pasar, serta pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kualitas produk mereka (Fadilla & Hasan, 2023; Yunus et al., 2021). Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas keterampilan sangat penting dalam memberdayakan UMKM, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh (Yunus et al., 2021), yang menekankan pentingnya pelatihan berbasis analisis SWOT untuk pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Namun, temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM membutuhkan keberlanjutan program dan kolaborasi antar berbagai pihak. Skripsi ini menyoroti peran "Rumah Kreatif" sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha mikro, yang tidak hanya menyediakan pelatihan keterampilan tetapi juga memperluas jejaring bisnis melalui program "Temu Usaha". Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi kreatif untuk sektor pariwisata (Fadilla & Hasan, 2023) temuan skripsi ini lebih terfokus pada pemberdayaan sektor usaha mikro secara umum di Kabupaten Labuhanbatu, yang memperlihatkan aspek yang lebih luas dari pemberdayaan ekonomi. Berbeda dengan temuan penelitian "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19" oleh (Anggraeni et al., 2021), yang lebih memfokuskan pada kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM selama masa pandemi, temuan dalam skripsi ini menunjukkan bagaimana upaya pemberdayaan dilaksanakan dalam konteks pasca-pandemi dengan fokus pada pemulihan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bantuan pemerintah berupa peralatan produksi menggantikan bantuan modal yang lebih tradisional, yang sebelumnya menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro karena ketidakmampuan untuk memberikan jaminan pinjaman. Hal ini menolak temuan sebelumnya yang menganggap bahwa pemberian dana bantuan lebih efektif dibandingkan dengan peralatan produksi. Temuan ini juga menolak beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang mengandalkan pendekatan yang lebih sektoral atau berbasis wilayah yang lebih besar, seperti penelitian "*The Effect of Environmental Management Based MSMEs Empowerment*" oleh (Syntia et al., 2018), yang lebih berfokus pada pengelolaan lingkungan dalam pemberdayaan UMKM. Temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di Kabupaten Labuhanbatu tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan politik, di mana pelaku usaha mikro diberdayakan untuk terlibat dalam kebijakan yang memengaruhi usaha mereka. Selain itu, penekanan pada akses pasar digital dalam pemberdayaan, meskipun penting, tidak menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian terdahulu yang lebih mengutamakan aspek pasar fisik dan peran komunitas lokal dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, temuan dalam skripsi ini memberikan kebaruan dalam literatur mengenai pemberdayaan UMKM, terutama dalam konteks lokal Kabupaten Labuhanbatu, yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan teknologi, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah dapat lebih efektif memberdayakan usaha mikro melalui kolaborasi dengan komunitas dan pendekatan yang lebih holistik dalam konteks pasca-pandemi.

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu menghadapi kompleksitas tantangan yang bersifat multidimensional di tengah potensi kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan analisis kondisi yang ada, usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu masih menghadapi hambatan substansial dalam akses terhadap sumber daya dasar, dengan 60-70% pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit formal sehingga mayoritas (75%) masih bergantung pada sumber pendanaan informal dengan bunga tinggi. Kesenjangan digital juga menjadi persoalan serius dimana hanya 30-40% usaha mikro yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam operasional bisnisnya, dengan angka yang lebih rendah lagi (16%) untuk pemanfaatan platform e-commerce. Keterbatasan akses terhadap informasi pasar yang komprehensif juga menjadi kendala bagi sekitar 70% usaha mikro, sehingga mayoritas masih terpaku pada pasar lokal dengan jangkauan terbatas. Meskipun telah ada upaya peningkatan keterampilan melalui inisiatif seperti "Rumah Kreatif", efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran untuk memenuhi prasarana dan permodalan yang dibutuhkan dalam menaikkan kelas para pelaku usaha mikro. Di sisi lain, partisipasi politik dan sosial pelaku usaha mikro menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari keterlibatan mereka dalam komunitas-komunitas yang saling memberdayakan dan memperjuangkan aspirasi bersama. Bantuan permodalan berupa peralatan dan dana bergulir, serta pelatihan yang disediakan oleh komunitas UMKM dan dinas terkait menjadi faktor pendukung penting dalam upaya pemberdayaan. Namun demikian, beberapa faktor penghambat utama seperti keterbatasan anggaran, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya pengetahuan finansial dan keterampilan teknis masih menjadi tantangan besar. Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam penguatan akses permodalan, pelatihan, akselerasi transformasi digital, ekspansi akses pasar, dan penguatan kelembagaan belum optimal karena implementasinya yang belum merata dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek pemberdayaan usaha mikro, masih diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya berfokus pada satu dinas saja sebagai objek penelitian berdasarkan teori kapabilitas (Sen, 1999).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada objek penelitian serupa berkaitan dengan program pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan pujian syukur dan keagungan kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberi kehidupan, perlindungan dan penyertaan kepada penulis. Ucapan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung kemajuan perkembangan penulis, kepada Dosen Pembimbing skripsi Bapak Nurhadi S.Sos, M. A. P yang berdedikasi telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi, kepada pimpinan serta jajaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang

tidak dapat disebutkan satu-satu yang terlibat membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65.
<https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354>
- Anggraini, W., Lambelanova, R., & Ritonga, N. (2022). PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT OLEH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2).
<https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2525>
- Cendekia, M. S., Dr. Drs. Ismail Nurdin, M. S., Dra. Sri Hartati, M. S., & 228/JTI/2019, A. I. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. MEDIA SAHABAT CENDEKIA*. <https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ>
- Fadilla, D., & Hasan, M. (2023). *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KREATIF PENUNJANG SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN WAJO*. 17. <https://doi.org/10.19184/jpe.v17i2.40291>
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Hendrawati Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. IKAPI.
- Ife, J. (1997). *Rethinking Social Work: Towards Critical Practice*. Longman.
<https://books.google.co.id/books?id=cd1ePAAACAAJ>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>

- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
<https://books.google.co.id/books?id=o4STPwAACAAJ>
- Purnomo, S., & Purwandari, S. (2025). A Comprehensive Micro, Small, and Medium Enterprise Empowerment Model for Developing Sustainable Tourism Villages in Rural Communities: A Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 17(4).
<https://doi.org/10.3390/su17041368>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=NQs75PEa618C>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (1st ed.). ALFABETA.
- Suwatno, Mulyani, H., & Kurniawan, A. (2016). Empowerment strategies in cooperative and micro, small, medium enterprises (MSME) to increase people's income. *International Journal of Economic Research*, 13(7), 3055 – 3067.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85013996189&partnerID=40&md5=e1b2d87c0c29feaf79f28f05b5f2c904>
- Syntia, R., Badaruddin, Sadalia, I., & Mulya, M. B. (2018). The effect of environmental management based micro, small & medium enterprises (MSMEs) empowerment on the achievement of sustainable development. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(8), 1191 – 1205.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85052757549&partnerID=40&md5=8c5eb48fa1d90bd1738ef2e15ffdca21>
- Yunus, M., Adi Sari, I., & Wahyuhastuti, N. (2021). Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendekatan Analisis SWOT Balanced Scorecard. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 5.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31685/kek.V5i3.968>